DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN TAHUN 2026
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyusun Daftar Rancangan Peraturan Perusahaan Tahun 2026 yang memuat rancangan prosedur dari berbagai divisi, beserta tahapan atau status penyusunannya. Informasi ini memberikan gambaran mengenai regulasi internal yang sedang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Secara umum, proses penyusunan peraturan dimulai dari perumusan draft oleh divisi pemrakarsa, dilanjutkan dengan permintaan dan proses review oleh Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum, koordinasi serta penyampaian hasil review final, kemudian persetujuan Direksi atau pejabat yang berwenang hingga pengesahan. Peraturan yang telah disahkan selanjutnya didistribusikan dan/atau disosialisasikan sesuai kebutuhan serta diarsipkan sebagai bagian dari pengelolaan dokumen perusahaan.

DOKUMEN SELENGKAPNYA→

Perkebunan Nusantara

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) DAN TAHAPAN PEMBENTUKANNYA TAHUN 2026

No.	Judul Peraturan/Kebijakan	Penanggung Jawab	Tahapan
1.	Pemantauan/Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	Divisi Satuan Pengawasan Intern	Penyusunan dokumen
2.	Komunikasi dan Publikasi Stakeholders	Divisi Sekretariat Perusahaan	Penyusunan dokumen
3.	Persetujuan Aksi Korporasi dan/atau Tindakan Tertentu oleh Anak Perusahaan	Divisi Strategi dan Manajemen Kinerja Korporasi	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
4.	Penetapan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Program ESG Serta Sustainability	Divisi Strategi dan Manajemen Kinerja Korporasi	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
5.	Pengukuran dan Survei	Divisi Strategi dan Manajemen Kinerja Korporasi	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
6.	Perencanaan Strategi Pengembangan Bisnis dan Green Business/ Energi Baru Terbarukan	Divisi Strategi dan Manajemen Kinerja Korporasi	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
7.	Service Catalogue Management (Manajemen Katalog Layanan)	Divisi Strategi dan Manajemen Kinerja Korporasi	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
8.	Pengelolaan Hubungan Kelembagaan	Divisi Transformasi Digital	Divisi Transformasi Digital
9.	Pengelolaan Pengamanan Aset	Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
10.	Penyusunan Paket Pengadaan (PK) Bersama Bahan Bakar Minyak Solar	Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum	Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
11.	Penyusunan Paket Pengadaan (PK) Bersama Bahan Bakar Minyak Solar	Divisi Kelapa Sawit dan Karet	Penyusunan dokumen
12.	Pedoman Pengelolaan Kebijakan SDM	Divisi Strategi dan Pengembangan SDM	Penyusunan dokumen
13.	Rekrutmen PTPN Group	Divisi Operasional SDM	Penyusunan dokumen
14.	Sistem Penggajian dan Pendapatan Lainnya	Divisi Operasional SDM	Penyusunan dokumen
15.	Proses Administrasi Data Kepersonaliaan Karyawan dan Remunerasi Karyawan pada Sistem ERP-SAP	Divisi Operasional SDM	Penyusunan dokumen
16.	Sistem Manajemen Kinerja Karyawan Terintegrasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Divisi Operasional SDM	Penyusunan dokumen
17.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Divisi Operasional SDM	Penyusunan dokumen
18.	Penyusunan RKAP Konsolidasi	Divisi Keuangan Strategis dan Anggaran	Penyusunan dokumen
19.	Pengawasan Permintaan Anggaran Eksploitasi	Divisi Keuangan Strategis dan Anggaran	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
20.	Penyusunan RKO Konsolidasi	Divisi Keuangan Strategis dan Anggaran	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
21.	Penyusunan Prognosa Konsolidasi	Divisi Keuangan Strategis dan Anggaran	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
22.	Pengawasan Permintaan Anggaran Investasi	Divisi Keuangan Strategis dan Anggaran	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
23.	Monitoring Cash Flow Projection 13 Weeks	Divisi Keuangan Strategis dan Anggaran	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
24.	Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Manajemen Perkebunan Nusantara	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Penyusunan dokumen
25.	Penyusunan Business Continuity Strategy (BCS)	Divisi Manajemen Risiko	Penyusunan dokumen
26.	Penyusunan Risk Assessment (RA) BCMS	Divisi Manajemen Risiko	Penyusunan dokumen
27.	Penyusunan Business Impact Analysis (BIA)	Divisi Manajemen Risiko	Penyusunan dokumen
28.	Penyusunan Produk & Layanan Kritis (Key Product & Services)	Divisi Manajemen Risiko	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum

29.	Kajian Risiko Program Strategis Korporasi	Divisi Manajemen Risiko	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
30.	Identifikasi dan Monitoring Kewajiban Regulasi	Divisi Manajemen Risiko	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum
31.	Sistem Informasi Manajemen Risiko (ERIN)	Divisi Manajemen Risiko	Review Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum

Secara umum, tahapan dalam setiap penyusunan peraturan di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara diantaranya sebagai berikut:

1. Divisi pemrakarsa merumuskan draft peraturan atau kebijakan;
2. Divisi pemrakarsa menyampaikan permintaan review atas draft peraturan kepada Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum dilengkapi dengan dokumen pendukung dan masukan dari divisi lainnya jika ada;
3. Proses review oleh Divisi Kelembagaan dan Hukum serta proses koordinasi dengan divisi pemrakarsa;
4. Penyampaian review final atas draft peraturan kepada divisi pemrakarsa;
5. Proses persetujuan Direksi/Pejabat yang berwenang;
6. Pengesahan peraturan;
7. Distribusi peraturan dan/atau sosialisasi jika diperlukan;
8. Pengarsipan.